

LAPORAN
MONITORING, EVALUASI DAN RENCANA TINDAKLANJUT
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
POLTEKKES KEMENKES DENPASAR
TRIWULAN III
TAHUN 2025



DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widi Wasa, karena atas kasih karunia-Nya Laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Triwulan III Poltekkes Kemenkes Denpasar Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Laporan ini disusun sebagai tindak lanjut dari kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan di lingkungan Poltekkes Kemenkes Denpasar. Tujuan dari laporan ini adalah untuk menilai pelaksanaan PPID serta evaluasi terhadap kinerja PPID dalam menyediakan, mengelola, dan memberikan informasi kepada publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta untuk merumuskan langkah-langkah perbaikan yang dapat dilakukan ke depan.

Pada kesempatan ini kami sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar- besarnya kepada semua pihak yang telah ikut membantu dalam penyusunan laporan ini. Besar harapan kami kepada semua pihak agar dapat memberikan saran dan kritik yang membangun, sehingga dapat dipakai sebagai masukan guna penyempurnaan Laporan Monev Triwulan III Poltekkes Kemenkes Denpasar di masa mendatang.

Akhirnya semoga Laporan Monev ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi pegawai/staf di lingkungan Poltekkes Kemenkes Denpasar khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Denpasar, 5 Oktober 2025

Ketua PPID Poltekkes Kemenkes Denpasar



Ida Bagus Putu Putra Kencana, SST., M.Kes NIP.

1910111199031001

BAB I

PENDAHULU

AN

A. Latar Belakang

Perwujudan tata kelola pemerintahan yang bersih dan terbuka sangat bergantung pada transparansi informasi, sebagaimana yang telah diatur secara legal dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sebagai pilar akuntabilitas publik, setiap instansi pemerintah wajib menjamin ketersediaan informasi yang valid, faktual, dan tidak menyesatkan bagi masyarakat.

Poltekkes Kemenkes Denpasar berkomitmen penuh terhadap amanat ini dengan mengoptimalkan peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai garda terdepan layanan data publik. Kehadiran PPID diproyeksikan mampu memotong alur birokrasi sehingga masyarakat dapat menikmati akses data secara instan, praktis, dan akuntabel.

Untuk menjaga performa layanan agar tetap berada pada koridor standar yang ditetapkan, evaluasi berkala di akhir kuartal mutlak diperlukan. Evaluasi pada Triwulan III ini dirancang untuk membedah tingkat keberhasilan operasional harian, meninjau volume pengajuan informasi beserta respons penyelesaiannya, memetakan hambatan riil di lapangan, serta merumuskan rekomendasi strategis demi mendongkrak mutu pelayanan ke depan.

B. Ruang Lingkup

Cakupan monitoring dan evaluasi PPID pada Triwulan III ini menyentuh seluruh aspek operasional pengelolaan informasi di lingkungan Poltekkes Kemenkes Denpasar. Ruang lingkup tersebut meliputi manajemen permohonan informasi dari publik, pengarsipan dan klasifikasi dokumen, optimalisasi kanal digital resmi institusi, hingga penanganan komplain terkait keterbukaan informasi. Evaluasi ini juga menakar sejauh mana efisiensi dan integritas personel PPID dalam menyuplai data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

C. Tujuan Kegiatan

Pelaksanaan monev Triwulan III ini bertujuan untuk menakar tingkat kepatuhan implementasi keterbukaan informasi publik di Poltekkes Kemenkes Denpasar

terhadap regulasi yang berlaku. Secara spesifik, agenda ini menyorot pengawasan administrasi dokumen, penilaian mutu layanan masyarakat, serta pemetaan problem teknis. Hasil dari analisis ini nantinya akan dijadikan acuan utama (baseline) dalam merancang program peningkatan layanan di kuartal berikutnya.

D. Manfaat

Kegiatan pemantauan ini memberikan stimulus positif bagi internal organisasi dalam memetakan potret pelayanan data terkini. Institusi dapat dengan mudah mendeteksi area mana saja yang sudah berjalan optimal dan bagian apa yang memerlukan intervensi perbaikan. Lebih jauh, data dari laporan ini menjadi basis kebijakan (evidence-based policy) untuk merencanakan pembaruan sistem informasi publik yang lebih transparan, responsif, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat luas.

BAB II

TINDAK LANJUT TERHADAP REKOMENDASI

1. Rekomendasi yang Diberikan

Mengevaluasi dinamika pelayanan pada periode Triwulan III, tim mencatat beberapa poin krusial yang memerlukan atensi lebih demi menyempurnaan sistem informasi di Poltekkes Kemenkes Denpasar. Poin mutlak yang direkomendasikan adalah akselerasi pembaruan kompetensi para staf atau SDM yang mengawaki PPID. Penguatan kompetensi ini dipandang vital agar petugas memiliki penguasaan yang mendalam mengenai alur penanganan informasi, tata cara dokumentasi modern, serta aspek hukum keterbukaan informasi agar pelayanan dapat disajikan secara kilat, aman, dan profesional.

2. Tindak Lanjut yang Dilakukan

Sebagai tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan, manajemen telah mengambil langkah konkret berupa penyelenggaraan forum edukasi internal serta penguatan sinergi antar-subbagian terkait tata kelola data publik. Para operator PPID juga diinstruksikan untuk lebih proaktif mendalami regulasi terbaru seputar hak informasi publik guna meminimalkan kesalahan prosedur. Langkah akseleratif ini diharapkan mampu memperkuat kapasitas internal petugas dalam menyuguhkan performa layanan yang prima dan memuaskan bagi publik. Proses pemantauan terhadap dampak dari tindakan korektif ini akan diteruskan secara konsisten pada triwulan penutup.

BAB III

PENCAPAIAN DAN PERBAIKAN

1. Pencapaian dari Tindak Lanjut

Berdasarkan tindak lanjut atas rekomendasi yang telah diberikan pada pelaksanaan monitoring dan evaluasi Triwulan III, implementasi tindakan korektif pasca-evaluasi Triwulan III terbukti membawa dampak transformatif pada manajemen informasi Poltekkes Kemenkes Denpasar. Salah satu progress paling signifikan terlihat pada cairnya komunikasi dan koordinasi lintas unit kerja, yang membuat proses pengumpulan bahan informasi berjalan lebih mulus. Ditambah lagi dengan adanya bimbingan teknis berkala, pemahaman regulasi para petugas kini jauh lebih matang. Efek positifnya langsung terasa pada kecepatan durasi respons klaim informasi, di mana pelayanan menjadi lebih taktis dan terukur.

2. Masalah yang Masih Dihadapi

Kendati performa grafiknya menanjak, masih ditemukan beberapa residu persoalan yang menuntut penyelesaian. Hambatan yang paling kentara adalah keterbatasan jumlah personel yang didedikasikan khusus untuk mengelola operasional PPID secara penuh (full-time). Di sisi lain, birokrasi internal penarikan data dari beberapa unit pendukung adakalanya masih memakan waktu, yang berpotensi menghambat ritme kerja PPID. Hal ini menandakan masih perlunya komitmen kolektif yang lebih kuat dari seluruh elemen institusi. Langkah koreksi berkelanjutan melalui pelatihan SDM, integrasi database digital, serta penegasan komitmen kerja sama antar-unit tetap menjadi pekerjaan rumah yang harus dituntaskan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan telaah mendalam terhadap indikator money Triwulan III di Poltekkes Kemenkes Denpasar, secara garis besar performa dan tata kelola informasi yang dijalankan PPID telah berada pada jalur yang benar (on track) serta sesuai koridor hukum. Layanan pemenuhan informasi publik terbukti diberikan secara transparan dan responsif, ditopang oleh kolaborasi yang solid antar-sektor dalam penyediaan basis data.

Walau program pembenahan kapasitas internal dan penyelarasan pemahaman regulasi telah menunjukkan hasil positif, restrukturisasi SDM serta modernisasi sistem informasi tetap menjadi fokus utama yang perlu diprioritaskan ke depan.

2. Saran

Sebagai upaya nyata untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik di lingkungan Poltekkes Kemenkes Denpasar, disarankan agar institusi secara konsisten menyelenggarakan program pengembangan kompetensi bagi seluruh personel PPID melalui pelatihan, workshop tematik, maupun sosialisasi yang berkelanjutan. Di samping itu, perlu dibangun komitmen yang lebih kuat serta kejelasan alur koordinasi dengan seluruh unit kerja internal guna mempercepat proses penarikan data yang valid dan akurat demi memenuhi kebutuhan masyarakat.

Terakhir, modernisasi dan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi pada kanal-kanal digital resmi harus terus ditingkatkan agar masyarakat dapat mengakses informasi publik secara lebih mudah, praktis, dan transparan. Melalui rangkaian langkah strategis tersebut, diharapkan PPID Poltekkes Kemenkes Denpasar dapat menjelma menjadi unit layanan yang tidak hanya akuntabel, tetapi juga sangat responsif terhadap hak informasi publik.